

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu negara. Melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara singkat adalah sebuah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan terlihat adanya aspek dinamis dalam suatu perekonomian, yaitu terlihat bagaimana perekonomian suatu negara yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1981: 9), suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang mengalami kenaikan output per kapita. Sebaliknya, jika selama jangka waktu yang sudah panjang tersebut, output per kapita menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, maka penurunan ini bukan pertumbuhan ekonomi.

2.1.1.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Dalam ilmu ekonomi terdapat banyak teori pertumbuhan, sehingga tidak ada suatu teori pertumbuhan yang menyeluruh, lengkap, dan merupakan satu-satunya

teori pertumbuhan yang baku. Berikut teori pertumbuhan yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi diantaranya adalah (Lincoln Arsyad, 1992: 39):

1) Teori Rostow

Teori ini merupakan artikel Rostow yang dimuat dalam *Economic Journal* (Maret 1956) yang dikembangkan dalam buku yang berjudul *The Stage Of Economic Growth* (1960). Menurut Rostow, ada lima tahapan dalam proses pembangunan ekonomi yang merupakan karakteristik pertumbuhan ekonomi, sosial dan politik yang terjadi. Antara lain yaitu:

a) Masyarakat Tradisional (*The Traditional Society*)

Masyarakat yang fungsi produksinya masih terbatas yang ditandai oleh cara produksi yang relatif masih primitif dan cara hidup masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai kurang rasional, tetapi kebiasaan itu masih turun menurun.

b) Tahap Prasyarat Tinggal Landas (*The Prerequisite Take Off*)

Tahap transisi di masyarakat untuk mempersiapkan diri agar mencapai pertumbuhan dengan menggunakan kekuatan sendiri. Namun pertumbuhan ekonomi hanya akan tercapai jika diikuti oleh kemampuan masyarakat untuk menggunakan ilmu pengetahuan modern dan membuat penemuan baru yang bisa menurunkan biaya produksi.

c) Tahap Tinggal Landas (*The Take Off*)

Pada awal tahap tinggal landas, pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan terjadi apabila terlihat adanya suatu perubahan drastis dalam masyarakat. Menurut Rostow tiga ciri utama negara yang sudah mencapai masa tinggal landas, yaitu :pertama, terjadinya kenaikan investasi produktif dari 5% atau kurang menjadi 10% dari produk nasional bersih (*Net National Product = NNP*). Kedua, terjadinya perkembangan satu atau beberapa sektor industri dengan tingkat pertumbuhan yang sangat tinggi (*Leading Sector*). Ketiga terjadinya kerangka dasar politik, sosial dan kelembagaan yang bisa menciptakan perkembangan sektor modern dan eksternalitas ekonomi yang bisa menyebabkan pertumbuhan ekonomi terus terjadi.

d) Tahap menuju kedewasaan (*Toward To Maturity*)

Merupakan tahap dimana masyarakat sudah secara efektif menggunakan teknologi modern pada hampir semua kegiatan produksi.

e) Masa Konsumsi Energi (*The High Consumption*)

Menurut Rostow, masa ini adalah tahap akhir dalam proses pembangunan ekonomi. Masyarakat menekankan masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi kesejahteraan masyarakat bukan masalah produksi.

2) Teori Klasik

Adam Smith (1723-1790) dalam bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation: (1776)*" atau singkatnya "*Wealth of Nation*" menjelaskan mengenai proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang terjadi secara sistematis. Menurut Adam Smith ada dua aspek utama dari pertumbuhan ekonomi yaitu :

a. Pertumbuhan *Output* (GDP) Total

Menurut Adam Smith ada tiga unsur pokok dalam sistem produksi suatu negara, yaitu :

- i. Sumber daya alam yang tersedia. Merupakan sumber paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat.
- ii. Sumber daya insani. Artinya, dalam proses pertumbuhan output, sumber daya insani merupakan peran pasif. Jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari masyarakat tersebut.
- iii. Stok barang modal yang ada. Artinya unsur ini mempunyai peranan sentral karena menurut Adam Smith, semakin besar stok modal maka semakin besar kemungkinan dilakukan spesialisasi yang akhirnya dapat meningkatkan produktivitas kerja.

b. Pertumbuhan penduduk

Menurut Adam Smith, jika tingkat upah yang berlaku lebih tinggi dari tingkat upah subsisten maka akan meningkatkan jumlah penduduk. Tingkat upah yang berlaku ditentukan oleh tarik-menarik antara kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sementara itu permintaan tenaga kerja ditentukan oleh stok modal dan tingkat output masyarakat.

3) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter dalam bukunya berjudul "*The Theory of Economic Development*" (1934) mengemukakan bahwa sistem kapitalisme adalah sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi menurut Schumpeter adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para wiraswasta. Kemajuan ekonomi atau peningkatan output total suatu masyarakat hanya bisa diterapkan dengan adanya inovasi oleh para wiraswasta.

2.1.1.2 Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Berikut beberapa alasan mengapa yang digunakan sebagai indikator pertumbuhan ekonomi adalah PDB bukan indikator lainnya yaitu :

- a) PDB adalah nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh aktivitas produksi di dalam perekonomian. Artinya, peningkatan PDB juga mencerminkan peningkatan balas jasa kepada faktor produksi yang digunakan dalam aktivitas produksi tersebut.
- b) PDB dihitung atas dasar konsep aliran (*flow concept*). Artinya, perhitungan PDB hanya mencakup nilai produk yang dihasilkan pada satu periode sebelumnya. Pemanfaatan konsep aliran, guna menghitung PDB yang memungkinkan kita untuk membandingkan jumlah output yang dihasilkan pada tahun ini dengan tahun sebelumnya.
- c) Batas wilayah perhitungan PDB adalah negara atau perekonomian domestik. Hal ini memungkinkan kita untuk mengukur sejauh mana kebijaksanaan ekonomi yang diterapkan pemerintah mampu mendorong aktivitas perekonomian domestik.

2.1.1.3 Faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi

Menurut N. Gregory Mankiw (2003: 59), faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah :

- a. Tenaga Kerja

Faktor tenaga kerja adalah salah satu faktor produksi penting dalam kaitannya

dengan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Semakin banyak tenaga kerja, maka produktivitas juga akan meningkat.

b. Kapital

Barang-barang kapital penting artinya dalam mempertinggi keefisienan pertumbuhan ekonomi.

c. Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Sumber daya alam akan dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian suatu negara. Tersedianya sumber daya alam cukup merupakan faktor pendorong keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara.

d. Teknologi

Adalah cara untuk menghasilkan suatu jenis barang tertentu. Teknologi mampu meningkatkan produksi dan pendapatan bagi masyarakat.

e. Faktor Sosial

Selain faktor ekonomi, faktor sosial juga mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Faktor sosial ini diantaranya keamanan, politik, adat istiadat, agama, sistem pemerintahan dan sebagainya. Apabila didalam masyarakat terdapat beberapa keadaan dalam sistem sosial

yang sangat menghambat pertumbuhan ekonomi, maka pemerintah harus berusaha untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut.

2.1.1.4 Rumus Pertumbuhan Ekonomi

$$PE = \left(\frac{PDB_T - PDB_{T-1}}{PDB_{T-1}} \right) \times 100\%$$

Dimana:

PE: Pertumbuhan ekonomi

PDB : Produk Domestik Bruto

PDB_T: Produk Domestik Bruto tahun sekarang

PDB_{T-1}: Produk Domestik Bruto tahun sebelumnya

2.1.2 Inflasi

Menurut Boediono Inflasi merupakan suatu kecenderungan mengenai harga-harga agar naik pada umumnya dan juga secara terus menerus. Keadaan ketika harga dari satu atau beberapa barang naik, maka itu bukanlah dapat dikatakan sebagai inflasi. Namun, jika harga barang yang naik tersebut meluas dan menyebabkan naiknya sebagian besar dari barang-barang lainnya itulah yang dinamakan inflasi.

Inflasi merupakan salah satu indikator untuk melihat stabilitas ekonomi yang

menunjukkan perkembangan harga barang dan jasa secara umum yang dihitung dari indeks harga konsumen.

2.1.2.1 Menentukan Tingkat Inflasi

Angka inflasi dihitung berdasarkan angka indeks yang dikumpulkan dari beberapa macam barang yang diperjual belikan dipasar dengan masing-masing tingkat harga (barang-barang ini tentu saja yang paling banyak dan merupakan kebutuhan pokok/utama bagi masyarakat). Berdasarkan data harga itu disusunlah suatu angka yang di indeks. Angka indeks yang memperhitungkan semua barang yang dibeli oleh konsumen pada masing-masing harganya disebut sebagai indeks harga konsumen (IHK atau *consumer price indeks* = CPI).

Adapun rumus untuk menghitung tingkat inflasi:

$$I_n = \frac{IHK_n - IHK_{n-1}}{IHK_{n-1}} \times 100\%$$

Dimana :

I_n = Inflasi.

IHK_n = Indeks harga konsumen tahun sekarang.

IHK_{n-1} = Indeks harga konsumen tahun sebelumnya.

2.1.2.2 Jenis-jenis Inflasi

1) Jenis Inflasi Menurut Sifatnya

Laju inflasi dapat berbeda antara satu negara dengan negara lain atau dalam satu negara untuk waktu yang berbeda. Jenis inflasi menurut sifatnya dibagi menjadi (Nopirin, 1987:27) :

a) Inflasi Merayap (*creeping inflation*)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikkan harga berjalan secara lambat, dengan presentase yang kecil serta dalam jangka yang relatif lama.

a) Inflasi menengah (*galloping inflation*)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar, (biasanya *double* digit atau bahkan *triple* digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya, harga-harga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat daripada inflasi yang merayap (*creeping inflation*).

b) Inflasi tinggi (*hyperinflation*)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Harga-harga naik sampai lima

atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam, sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjahi/ditutupi dengan mencetak uang.

2) Berdasarkan Penyebabnya

Berdasarkan pada sumber atau penyebab kenaikan harga-harga yang berlaku, inflasi biasanya dibedakan berdasarkan pada tiga bentuk yaitu :

a) Inflasi Tarikan Permintaan

Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi dan kemudian menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Disamping dalam masa perekonomian yang berkembang dengan pesat, inflasi tarikan permintaan juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidak stabilan politik yang terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah belanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut

menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut dalam menyediakan barang dan jasa.

b) Inflasi Desakan Biaya

Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akibatnya akan menyebabkan kenaikan harga-harga berbagai barang.

Pada tingkat kesempatan kerja yang tinggi perusahaan akan sangat memerlukan tenaga kerja. Keadaan ini cenderung akan menyebabkan kenaikan upah dan gaji karena :

- i. Perusahaan-perusahaan akan berusaha mencegah perpindahan tenaga kerja dengan menaikkan upah dan gaji.
- ii. Usaha-usaha untuk memperoleh pekerja tambahan hanya akan berhasil apabila perusahaan-perusahaan menawarkan upah dan gaji yang lebih tinggi.

c) Inflasi Diimpor

Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan terwujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peran yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan.

3) Menurut Sebab Terjadinya

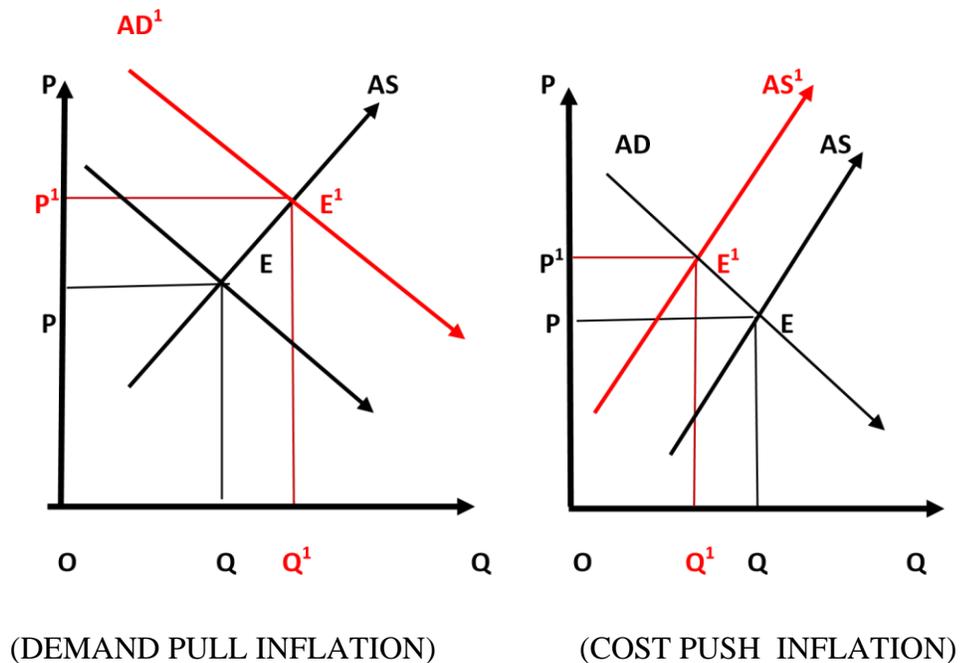
a. *Demand Pull Inflation*

Demand Pull Inflation disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang-barang (*aggregate demand*) bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan pendapatan yang tinggi dan kemudian menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menyebabkan inflasi.

b. *Cost Push Inflation*

Cost push inflation terjadi ketika adanya kenaikan harga pada barang-barang mentah yang diperlukan untuk memproduksi barang dan jasa, sehingga harga barang dan jasa mengalami penyesuaian dengan adanya kenaikan harga. *Cost Push Inflation* dapat disebabkan oleh adanya depresiasi nilai tukar,

inflasi di negara pengekspor barang mentah, dan dapat pula terjadi karena adanya bencana alam dan terganggunya sistem distribusi.



Gambar 2.1

Demand Pull Inflation dan Cosh Push Inflation

Sumber: Kajian Akademis BPKK-Kementrian Keuangan Tahun 2016 Achmat

Subekan dan Azwar

Pada grafik *Demand Pull Inflation* dimana bermula dengan harga P dan Output Q. kenaikan permintaan total dari AD ke AD₁ menyebabkan ada sebagian permintaan yang tidak dapat dipenuhi penawaran yang ada. Akibatnya, harga menjadi P₁ dan output naik menjadi Q₁.

Pada grafik *Cosh Push Inflation* dimana bermula pada harga P dan Q. Kenaikan biaya produksi (disebabkan baik karena berhasilnya tuntutan kenaikan upah oleh serikat buruh ataupun kenaikan harga bahan baku untuk industri) akan menggeser kurva penawaran total dari AS menjadi AS₁.

Konsekuensinya harga naik menjadi P₁ dan produksi turun menjadi Q₁. Proses ini akan berhenti apabila AS tidak lagi bergeser ke atas. Proses kenaikan ini (yang sering dibarengi dengan turunnya produksi) disebut dengan *Cost Push Inflation*.

1) Berdasarkan Parah Terjadinya Inflasi Tersebut (Boediono,1985 :162)

- a) Inflasi rendah, yaitu jenis inflasi yang jumlahnya kurang dari 10% per tahunnya.
- b) Inflasi sedang, yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar antara 10-30% per tahunnya.
- c) Inflasi berat, yaitu jenis inflasi yang besarnya berkisar 30-100% per tahunnya.
- d) *Hyperinflation* atau inflasi tak terkendali, yaitu dimana besarnya inflasi per tahun berada di atas 100%.

2) Jenis Inflasi Menurut Asal

- a) Inflasi dalam negeri (*domestic inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri sendiri ini timbul antara lain, karena

defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan percetakan uang baru, atau bisa juga disebabkan oleh gagal panen.

b) Inflasi luar negeri (*imported inflation*)

Inflasi yang disebabkan oleh adanya kenaikan harga-harga komoditi diluar negeri (di negara asing yang memiliki hubungan perdagangan dengan negara yang bersangkutan) . Inflasi ini hanya terjadi pada negara yang menganut sistem perekonomian terbuka (*Open Economy System*) yaitu sektor perdagangan luar.

2.1.2.3 Dampak inflasi

Inflasi yang terjadi didalam suatu perekonomian memiliki beberapa dampak atau akibat sebagai berikut,(Nanga, 2005):

- 1) Inflasi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan pendapatan. Hal ini akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dari anggota masyarakat, sebab kesenjangan pendapatan yang terjadi akan menyebabkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetap pendapatan riil orang lainnya jatuh.
- 2) Inflasi dapat menyebabkan penurunan dalam efisiensi ekonomi. Hal ini dapat terjadi karena inflasi mengalihkan investasi dari padat karya menjadi padat modal sehingga menambahkan tingkat pengangguran.

- 3) Inflasi juga dapat menyebabkan perubahan-perubahan di dalam output dari kesempatan kerja, dengan cara memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.

2.1.2.4 Teori Inflasi

1) Teori kuantitas

Teori ini adalah teori yang masih sangat berguna untuk menganalisis sebabsebab timbulnya inflasi di zaman modern ini, terutama di negaranegara yang sedang berkembang. Teori ini lebih menyoroti peranan dalam proses terjadinya inflasi yang disebabkan dua faktor berikut (Boediono,1985 : 167-175):

a) Jumlah uang beredar

Inflasi akan terjadi jika ada penambahan jumlah uang yang beredar, baik penambahan uang kartal atau penambahan uang giral. Sesuai dengan teori kuantitas yang diajukan oleh ekonom bernama *Irving Fisher*, yang dijabarkan dalam persamaan berikut:

$$MV = PT$$

Dimana :

M = Jumlah uang beredar (M_1)

V = Kecepatan peredaran uang

P = Tingkat harga-harga dan

T = Jumlah barang dan jasa yang diperjual belikan dalam satu tahun tertentu.

Faktor yang dianggap konstan adalah V dan T, sehingga jika M (money in *circulation*) bertambah, maka akan terjadi inflasi (kenaikan harga).

b) Ekspetasi atau harapan masyarakat mengenai kenaikan harga.

Laju inflasi ditentukan oleh laju pertambahan jumlah uang beredar dan oleh psikolog (harapan) masyarakat mengenai harga-harga di masa mendatang. Ada tiga kemungkinan keadaan, keadaan yang pertama adalah bila masyarakat tidak (atau belum) mengharapkan harga-harga untuk naik pada bulan-bulan mendatang. Kedua adalah dimana masyarakat (atas dasar pengalaman di bulan-bulan sebelumnya) mulai sadar bahwa ada inflasi. Dan yang ketiga terjadi pada tahap inflasi yang lebih parah yaitu tahap hiperinflasi, pada tahap ini orang-orang sudah kehilangan kepercayaan terhadap nilai mata uang. Hiperinflasi ini pernah terjadi di Indonesia selama periode tahun 1961-1966.

2) Teori Keynes

Teori ini menerangkan bahwa proses inflasi terjadi karena permintaan masyarakat akan barang-barang selalu melebihi jumlah barang-barang yang tersedia. Hal ini yang disebut juga dengan *inflationary gap*. *Inflationary gap* terjadi apabila

jumlah dari permintaan-permintaan efektif dari semua golongan tersebut, pada tingkat harga yang berlaku melebihi jumlah maksimum dari barang-barang yang dihasilkan oleh masyarakat. Harga-harga akan naik, karena permintaan total melebihi jumlah barang yang tersedia.

Adanya kenaikan harga-harga tersebut berarti bahwa kegiatan rencana pembelian barang dari golongan-golongan tersebut tidak terpenuhi, selanjutnya mereka akan berusaha untuk memperoleh data yang lebih besar lagi, baik golongan pemerintah melalui pencetakan uang baru, atau para pengusaha swasta melalui kredit dari bank, atau pekerja kenaikan tingkat upah yang lebih besar.

3) Teori Strukturalis

Teori mengenai inflasi yang didasarkan atas pengalaman di Negaranegara Amerika Latin. Teori ini memberikan tekanan pada ketagaran (*rigidities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang. Menurut Boediono (1998), karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural dari perekonomian (yang menurut definisi, faktor-faktor ini hanya bisa berubah secara gradual dan dalam jangka panjang) maka teori ini bisa disebut teori inflasi jangka panjang. Mengenai teori strukturalis ini ada 3 hal yang perlu ditekankan :

- a) Teori ini menerangkan proses inflasi jangka panjang di negara-negara yang sedang berkembang.

- b) Ada asumsi bahwa jumlah uang beredar bertambah dan secara pasif mengikuti dan menampung kenaikan harga-harga tersebut. Dengan kata lain, proses inflasi tersebut bisa berlangsung terus hanya apabila jumlah uang beredar juga bertambah terus. Tanpa kenaikan jumlah uang proses tersebut akan berhenti dengan sendirinya.
- c) Faktor-faktor struktural yang dikatakan sebagai sebab musabab yang paling dasar dari proses inflasi tersebut bukan 100% struktural. Sering dijumpai bahwa keterangan-keterangan tersebut disebabkan oleh kebijakan harga atau moneter pemerintah sendiri.

2.1.2.5 Efek Inflasi

- a) Efek terhadap pendapatan (*equity effect*)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi tidak pula yang diuntungkan dengan adanya inflasi. Pihak-pihak yang dirugikan adalah masyarakat yang mendapatkan pendapatan tetap, orang yang mempunyai kekayaan dalam bentuk uang kas, demikian juga dengan pihak yang memberikan bunga yang lebih rendah dari laju inflasi. Sedangkan pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan presentase yang lebih besar dari laju inflasi, atau mereka yang mempunyai kekayaan bukan uang dimana nilainya naik dengan presentase lebih besar dari laju inflasi.

Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

b) Efek terhadap efisiensi (*efficiency effects*)

Inflasi dapat mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu.

Dengan adanya inflasi, permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan yang lebih besar dari barang lain yang kemudian mendorong kenaikan produksi barang tersebut.

c) Efek terhadap output (*output effect*)

Inflasi dapat mengakibatkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun apabila laju inflasi cukup tinggi (*hyperinflation*) dapat mengakibatkan sebaliknya, yaitu penurunan output.

Inflasi bisa dibarengi dengan kenaikan output, tetapi bisa juga dibarengi dengan penurunan output. Intensitas efek inflasi ini berbedabeda, apabila produksi barang ikut naik maka kenaikan produksi ini sedikit banyak dapat mengurangi laju

inflasi. Tetapi apabila ekonomi mendekati kesempatan kerja penuh (*full employment*) intensitas efek inflasi semakin besar. Inflasi dalam keadaan kesempatan kerja penuh ini sering disebut dengan inflasi murni (*pure inflation*).

2.1.2.6 Cara Mencegah Inflasi

Dengan menggunakan *Irving Fisher* $MV = PT$ dapat dijelaskan bahwa inflasi timbul karena MV naik lebih cepat dari pada T . Oleh karena itu untuk mencegah terjadinya inflasi maka salah satu variabel (M atau V) harus dikendalikan. Cara mengatur variabel MV dan T tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan kebijaksanaan moneter, fiskal atau kebijaksanaan yang menyangkut kenaikan produksi.

1) Kebijakan moneter

Kebijakan moneter adalah kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan nasional dengan cara mengubah jumlah uang yang beredar terlalu banyak sehingga dengan kebijakan ini diharapkan jumlah uang yang beredar dapat dikurangi menuju kondisi normal. Beredar dapat dilakukan melalui instrumen-instrumen berikut:

- a) Politik diskonto (politik uang ketat). Bank menaikkan suku bunga sehingga jumlah uang yang beredar dapat dikurangi. Kebijakan diskonto dilakukan dengan menaikkan tingka bunga sehingga mengurangi keinginan badanbadan pemberi

kredit untuk mengeluarkan pinjaman guna memenuhi permintaan pinjaman dari masyarakat. Akibatnya jumlah kredit yang dikeluarkan oleh badan-badan kredit akan berkurang, yang pada akhirnya mengurangi tekanan inflasi.

- b) Politik pasar terbuka bank sentral menjual obligasi atau surat berharga ke pasar modal untuk menyerap uang dan masyarakat dan dengan menjual surat berharga bank sentral dapat menekan perkembangan jumlah uang beredar sehingga jumlah uang beredar dapat dikurangi dan laju inflasi dapat lebih rendah. Operasi pasar terbuka (*open market operation*), biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*), dilakukan dengan menjual sura-surat berharga, seperti obligasi negara kepada masyarakat dan bank-bank. Akibatnya, jumlah uang beredar di masyarakat dan pemberian kredit oleh badan-badan kredit (bank) berkurang, yang pada akhirnya dapat mengurangi tekanan inflasi.
- c) Peningkatan *cash ratio*. Kebijakan persediaan kas artinya cadangan yang diwajibkan oleh Bank Sentral kepada keputusan dari bank sentral atau pemerintah. Dengan jalan menaikkan perbandingan antara uang yang beredar dengan uang yang mengendap di dalam kas mengakibatkan kemampuan bank untuk menciptakan kredit berkurang sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang.

2) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang berhubungan dengan finansial pemerintah. Kebijakan fiskal dapat dilakukan melalui instrumen berikut:

- a) Mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah, sehingga pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian dapat dikendalikan. Pemerintah tidak menambah pengeluarannya agar anggaran tidak defisit.
- b) Menaikkan pajak, dengan menaikkan pajak konsumen akan mengurangi jumlah konsumsinya karena sebagian pendapatannya untuk membayar pajak. Dan juga akan mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan ini berpengaruh pada daya beli masyarakat yang menurun, dan tentunya permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif tentunya berkurang.

3) Kebijakan Non Moneter

Kebijakan non moneter adalah kebijakan yang tidak berhubungan dengan finansial pemerintah maupun jumlah uang yang beredar, cara ini merupakan langkah alternatif untuk mengatasi inflasi. Kebijakan non moneter dapat dilakukan melalui instrumen berikut:

- a) Mendorong agar pengusaha menaikkan hasil produksinya. Cara ini cukup efektif mengingat inflasi disebabkan oleh kenaikan jumlah barang konsumsi tidak seimbang dengan jumlah uang yang beredar. Oleh karena itu pemerintah

membuat prioritas produksi atau memberi bantuan (subsidi) kepada sektor produksi bahan bakar, produksi beras.

- b) Kebijakan yang berkaitan dengan output. Kenaikkan output dapat memperkecil laju inflasi. Kenaikkan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.
- c) Kebijakan penentuan harga dan indexing. Hal ini dilakukan dengan penentuan ceiling price, serta mendasarkan pada indeks harga tertentu untuk gaji ataupun upah (dengan demikian gaji atau upah secara riil tetap). Jika indeks harga naik, maka upah atau gaji juga dinaikkan.

2.1.3 Investasi

Investasi menurut Abdul Halim (2005) pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Investasi dapat didefinisikan sebagai penundaan konsumsi sekarang untuk dimasukkan ke aktiva produktif selama periode waktu tertentu. Dengan adanya aktiva produktif, penundaan konsumsi sekarang untuk diinvestasikan ke aktiva yang produktif tersebut akan meningkatkan *utility* total.

Menurut Samuelson, investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang investaris dalam

waktu satu tahun. Investasi merupakan langkah mengorbankan konsumsi di waktu mendatang.

Dapat disimpulkan bahwa investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran atau pembelanjaan yang dapat berupa jenis barang modal, bangunan, peralatan modal, dan barang-barang inventaris yang digunakan untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa untuk meningkatkan produktivitas kerja sehingga terjadi peningkatan output yang dihasilkan dan tersedia untuk masyarakat.

2.1.3.1 Teori Investasi

Dalam jangka panjang pertumbuhan investasi berpengaruh pada bertambahnya stok capital dan selanjutnya menaikkan produktivitas. Berikut adalah teori-teori tentang investasi:

1) Teori Klasik

Pada ahli ekonom klasik berpendapat bahwa investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Semakin tinggi tingkat bunga maka keinginan untuk melakukan investasi akan semakin kecil. Semakin rendah tingkat bunga maka pengusaha akan terdorong untuk melakukan investasi sebab biaya penggunaan dana juga semakin kecil.

Menurut Adam Smith, investasi dilakukan karena para pemilik modal mengharapkan untung. Adam Smith yakin keuntungan cenderung menurun dengan

adanya kemajuan ekonomi. Pada waktu laju pemupukan modal meningkat, persaingan antar pemilik modal akan meningkat. Upah akan dinaikkan dan keuntungan yang diperoleh akan menurun.

Investasi juga sebagai sarana dan motivasi dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya memperluas penggunaan tenaga kerja dalam meningkatkan produksi. Kaum klasik menganggap akumulasi kapital sebagai suatu syarat mutlak bagi pembangunan ekonomi. Adanya pembangunan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan pendapatan. Jadi secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa dengan melakukan penanaman modal akan dapat meningkatkan pendapatan.

2) Teori Neo-Klasik

Teori neo-klasik tentang investasi merupakan akumulasi kapital optimal. Menurut teori ini, stok kapital yang diinginkan ditentukan oleh output dan harga dari jasa kapital relatif terhadap harga output. Harga jasa kapital pada gilirannya bergantung pada harga barang-barang modal, tingkat bunga, dan perlakuan pajak atas perusahaan.

Teori neo-klasik didasarkan pada pemikiran ahli-ahli ekonomi klasik mengenai penentuan keseimbangan faktor-faktor produksi oleh perusahaan-perusahaan. Untuk memaksimalkan keuntungannya, setiap perusahaan akan menggunakan suatu faktor

produksi hingga pada suatu tingkat dimana nilai produksi marginalnya sama dengan biaya yang dibelanjakan untuk memperoleh satu unit faktor produksi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan untuk memperoleh modal dan melakukan investasi adalah suku bunga, depresiasi, pendapatan nasional, dan kebijakan pemerintah.

3) Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar yaitu mempertahankan pendapat dari para ahli ekonomi sebelumnya yang merupakan gabungan dari pendapat kaum klasik dan Keynes, dimana beliau menekankan peranan pertumbuhan modal dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi. Teori Harrod-Domar memandang bahwa pembentukan modal dianggap sebagai pengeluaran yang akan menambah kemampuan suatu perekonomian untuk menghasilkan barang dan jasa, maupun sebagai pengeluaran yang akan menambah permintaan efektif seluruh masyarakat. Dimana apabila pada suatu masa tertentu dilakukan sejumlah pembentukan modal, maka pada masa berikutnya perekonomian tersebut mempunyai kemampuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa yang lebih besar.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Investasi

Berdasarkan jenisnya investasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama investasi pemerintah, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun

pemerintah daerah. Pada umumnya investasi dilakukan oleh pemerintah, tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Kedua, investasi swasta adalah yang dilakukan oleh sektor swasta nasional yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ataupun investasi yang dilakukan oleh swasta asing atau disebut Penanaman Modal Asing (PMA). Investasi yang dilakukan swasta bertujuan untuk mencari keuntungan dan memperoleh pendapatan serta didorong oleh adanya pertambahan pendapatan. Jika pendapatan bertambah konsumsi pun bertambah dan bertambah pula *effective demand*. Investasi timbul dia kibatkan oleh bertambahnya permintaan yang sumbernya terletak pada penambahan pendapatan (*induced investment*).

Dalam Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal dibagi mejadi dua yaitu Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanaman modal dalam negeri.

Penanaman Modal Asing (PMA) adalah salah satu upaya untuk meningkatkan jumlah modal untuk pembangunan ekonomi yang bersumber dari luar negeri, PMA terdiri dari:

- a) Investasi portofolio (*portofolio investment*), yaitu investasi yang melibatkan hanya aset-aset finansial saja, seperti obligasi dan saham, yang didenominasikan atau ternilai dalam mata uang nasional. Kegiatankegiatan investasi portofolio atau finansial ini biasanya berlangsung melalui lembaga-lembaga keuangan seperti bank, perusahaan dana investasi, yayasan pensiun, dan sebagainya.
- b) Investasi asing langsung (*foreign direct investment*), merupakan PMA yang meliputi investasi ke dalam aset-aset secara nyata berupa pembangunan pabrik-pabrik, pengadaan berbagai macam barang modal, pembelian tanah untuk keperluan produksi, dan sebagainya. Investasi asing secara langsung dapat dianggap sebagai salah satu sumber modal pembangunan ekonomi yang penting. Semua negara yang menganut sistem ekonomi terbuka, pada umumnya memerlukan investasi asing, terutama perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa untuk kepentingan ekspor. Dinegara maju seperti Amerika, modal asing (khususnya dari Jepang dan Eropa) tetap dibutuhkan guna memacu pertumbuhan ekonomi , menghindari kelesuan pasar dan penciptaan kesempatan kerja. Apalagi di negara berkembang seperti Indonesia, modal asing sangat diperlukan terutama sebagai akibat dari modal dalam negeri yang tidak mencukupi. Untuk itu berbagai kebijakan dibidang penanaman modal perlu diciptakan dalam upaya menarik pihak luar negeri untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Sedangkan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

1) Penggolongan investasi berdasarkan pembentukan modal terdiri dari dua jenis investasi, yaitu:

- a) Investasi Bruto, adalah investasi yang dilakukan oleh pemerintah yang belum dikurangi depresiasi.
- b) Investasi neto, adalah investasi bruto dikurangi depresiasi (jumlah perkiraan sejauh mana barang modal telah digunakan dalam periode yang bersangkutan).

2) Investasi berdasarkan timbulnya:

- a) Investasi otonomi, yaitu pembentukan modal yang tidak dipengaruhi pendapatan nasional.
- b) Investasi terpengaruh (*induced investment*), yaitu investasi yang dipengaruhi oleh pendapatan nasional.

3) Investasi secara luas bahwa dalam perhitungan pendapatan nasional, pengertian investasi meliputi:

- a) Seluruh nilai pembelian para pengusaha atas barang-barang dan modal dalam pembelanjaan untuk mendirikan industri-industri.
- b) Pengeluaran masyarakat untuk mendirikan rumah tempat tinggal.
- c) Pertumbuhan dalam nilai stok barang perusahaan berupa bahan mentah, barang yang belum diproses dan barang jadi.

2.1.3.3 Pendekatan dalam Berinvestasi

Ada beberapa pendekatan yang sering dapat digunakan untuk melakukan keputusan berinvestasi dalam perekonomian. Beberapa pendekatan yang dimaksud adalah:

1) Pendekatan nilai sekarang (*present value*)

Berdasarkan pendekatan ini proyek investasi dianggap menguntungkan dan dapat diterima jika nilai sekarang dari proyek investasi tersebut lebih besar daripada besarnya modal yang ditanam. Dengan kata lain proyek investasi diterima jika nilai sekarang bersih mempunyai nilai lebih besar daripada nol.

2) Pendekatan *Marginal Efficiency of Capital* (MEC)

Pendekatan ini lebih banyak digunakan ekonomi makro. MEC dapat diartikan sebagai tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang sebuah proyek investasi dengan besarnya modal yang diperlukan untuk ditanam dalam proyek investasi tersebut.

3) Pendekatan Investasi di Pasar Uang

Sebuah investasi juga dapat dilakukan dipasar uang. Keputusan ingin melakukan investasi domestik dan melakukan pinjaman luar negeri untuk diinvestasikan di mata uang asing juga dapat dilakukan.

2.1.3.4 Komponen-komponen Pengeluaran Investasi

Pengeluaran investasi dapat dibedakan menjadi empat komponen, diantaranya:

1) Investasi perusahaan-perusahaan swasta

Investasi perusahaan-perusahaan merupakan komponen yang tersebar dari investasi dalam suatu negara pada satu tahun tertentu. Pengeluaran investasi ini yang terutama diperhatikan oleh ahli-ahli ekonomi dalam membuat analisis mengenai investasi. Pengeluaran investasi tersebut terutama meliputi mendirikan bangunan industri, membeli mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya, dan

pengeluaran untuk menyediakan bahan mentah. Tujuan para pengusaha melakukan investasi ini adalah untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan produksi yang dilakukan di masa depan.

2) Investasi yang dilakukan oleh pemerintah

Pemerintah juga melakukan investasi. Berbeda dengan investasi perusahaan yang berujuan unuk mencari keuntungan, investasi pemerintah juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, investasi pemerintah dinamakan juga investasi sosial. Investasi-investasi tersebut meliputi pembangunan jalan raya, pelabuhan dan irigasi, mendirikan sekolah, rumah sakit, dan bendungan. Analisis untuk berinvestasi tersebut bukanlah aspek yang dibahas secara mendalam dalam teori makroekonomi.

3) Investasi untuk mendirikan tempat tinggal

Pembangunan rumah-rumah tempat tinggal juga merupakan pembelanjaan yang digolongkan sebagai investasi. Hal ini dikarenakan rumah mempunyai sifat yang mendekati peralatan produksi perusahaan, yaitu memakan waktu lama sebelum nilainya susut sama sekali, dan bangunan tersebut secara terus menerus menghasilkan jasa bagi pemilik atau penyewanya.

4) Investasi atas barang-barang investaris

Komponen yang paling kecil dari investasi adalah atas inventaris, yaitu stok barang simpanan perusahaan. Barang-barang yang digolongkan sebagai

inventory meliputi bahan mentah yang belum diproses, barang setengah jadi yang sedang diproses, dan barang yang sudah dihasilkan oleh perusahaan tetapi masih dalam simpanan dan belum dijual ke pasaran.

2.1.3.5 Tujuan Penyelenggaraan Investasi

- a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.
- b) Menciptakan lapangan kerja.
- c) Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan.
- d) Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional.
- e) Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional.
- f) Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan.
- g) Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dalam negeri maupun dari luar negeri.
- h) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Jumlah Uang Beredar

Jumlah uang beredar menurut Rahardja dan Manurung (2008:324) adalah nilai keseluruhan uang yang berada ditangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam

arti sempit (*narrow money*) adalah jumlah uang beredar yang terdiri dari uang kartal dan uang giral, yaitu :

$$M_1 = C + DD$$

Dimana :

M_1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit.

C = (*Currency*) uang kartal = uang kertas dan uang logam.

DD = (*Demand Deposit*) uang giral atau cek.

Uang beredar dalam arti luas (M_2) adalah M_1 ditambah deposit berjangka (*time deposit*).Yaitu :

$$M_2 = M_1 + TD$$

Dimana :

M_2 = Jumlah uang beredar dalam arti luas.

M_1 = Jumlah uang beredar dalam arti sempit.

TD = (*Time Deposit*) deposit berjangka.

Rahardja dan Manurung (2008:325) menyatakan bahwa secara teknis uang beredar adalah uang yang benar-benar berada ditangan masyarakat. Perkembangan

jumlah uang beredar mencerminkan perkembangan perekonomian. Perekonomian yang tumbuh dan berkembang menyebabkan jumlah uang yang beredar juga bertambah. Apabila perekonomian semakin maju, jumlah penggunaan uang kartal (uang kertas dan logam) semakin sedikit, digantikan uang giral. Perekonomian semakin maju komposisi M_1 dalam peredaran uang semakin kecil sebab porsi uang kuasi semakin besar.

1) Jumlah Uang Beredar dalam arti sempit (M_1)

Pengertian M_1 bahwa uang beredar adalah daya beli yang langsung bisa digunakan untuk pembayaran bisa diperluas dan mencakup alur-alur pembayaran yang mendekati uang, misalnya deposito berjangka dan simpanan tabungan pada bank-bank atau dapat diartikan pula sebagai uang kartal ditambah dengan uang giral (Boediono, 1985:3-4) :

$$M_1 = C + DD$$

Dimana:

M_1 = Jumlah Uang Beredar

C = *Carrency* (Uang Kartal)

DD = *Demand Deposits* (Uang Giral)

Seperti halnya dengan definisi uang beredar dalam arti paling sempit yaitu uang kartal, maka uang giral disini hanya mencakup saldo rekening koran atau giro milik masyarakat umum yang disimpan di bank, sedangkan saldo rekening koran milik pemerintah pada bank atau bank sentral tidak dimasukkan untuk dicatat mengenai uang giral ini adalah bahwa yang dimaksud disini adalah saldo atau uang milik masyarakat yang masih ada di bank dan belum digunakan oleh pemiliknya untuk berbelanja.

2) Jumlah Uang Beredar dalam Arti Luas (M_2)

Pengertian uang beredar dalam arti luas adalah disebut juga sebagai likuiditas moneter. Uang beredar dalam arti luas diartikan sebagai M_2 ditambah dengan deposito berjangka dan saldo tabungan milik masyarakat pada bankbank karena perkembangan M_2 ini juga mempengaruhi perkembangan harga, produksi dan keadaan ekoomi pada umumnya. (Boediono, 1985:5-6)

$$M_2 = M_1 + TD + SD$$

Dimana:

M_2 = Broad Money (Jumlah Uang Beredar dalam arti luas)

TD = *Time Deposits* (Deposito Berjangka)

$SD = \text{Saving Deposits}$ (Saldo Tabungan)

Definisi M_2 yang berlaku umum bagi semua negara tidak ada, karena halhal khas masing-masing negara perlu dipertimbangkan. Di Indonesia M_2 biasanya mencakup semua deposito berjangka dan saldo tabungan dalam rupiah pada bank-bank dengan tidak tergantung besar kecilnya simpanan tetapi tidak mencakup deposito berjangka dan saldo tabungan dalam mata uang asing.

3) Uang Beredar dalam Arti Lebih Luas (M_3)

Definisi uang beredar dalam arti lebih luas adalah M_3 yang merupakan cakupan semua deposito berjangka dan saldo tabungan, besar kecil, rupiah atau mata uang asing milik penduduk pada bank atau lembaga keuangan non bank. Seluruh deposito berjangka dan saldo tabungan ini disebut uang kuasi. (Boediono 1985:6)

$$M_3 = M_2 + QM$$

Dimana:

$M_3 =$ Jumlah Uang Beredar dalam arti paling luas

$M_2 =$ Broad Money (Jumlah Uang Beredar dalam arti luas)

$QM : \text{Quasi Money}$

Di negara yang menganut sistem devisa bebas (artinya setiap orang boleh memiliki dan memperjual belikan devisa secara bebas), seperti Indonesia, memang sedikit sekali perbedaan antara deposito berjangka, saldo tabungan dalam rupiah, deposito berjangka dan saldo tabungan dalam dolar. Setiap kali membutuhkan rupiah, dolar bisa langsung menjualnya ke bank atau sebaliknya. Dalam hal ini perbedaan antara M_2 dan M_3 menjadi tidak jelas. Deposito berjangka dan saldo tabungan dolar milik bukan penduduk tidak termasuk dalam definisi uang kuasi.

2.1.4.1 Fungsi Uang

Menurut Mankiw (2006, h.169) uang adalah seperangkat aset dalam perekonomian yang digunakan oleh orang-orang secara rutin untuk membeli barang atau jasa dari orang-orang lain. Dalam perekonomian, uang memiliki tiga fungsi:

1) Sebagai Alat Pertaran (*Medium of Exchange*)

Uang menunjukkan nilai pada suatu barang dan jasa yang diperjual belikan, menghitung besar kecilnya pinjaman dan menghitung kekayaan. Uang juga dapat digunaukkan untuk menentukan harga barang dan jasa. sehingga, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas transaksi.

2) Sebagai Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Pada fungsi ini, uang juga dapat mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Orang yang mendapatkan uang dari hasil menjual barang

atau jasanya, maka ia bisa menyimpan uangnya untuk digunakan dimasa yang akan datang.

2.1.4.2 Fungsi Turunan Uang

Selain fungsi diatas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan, yaitu:

1) Uang Sebagai Alat Pembayaran Utang

Uang dapat berfungsi sebagai standar dalam melakukan pembayaran dikemudian hari, pencicilan utang atau pembayaran berjangka panjang. Misal pencicilan sebuah bank dilakukan dengan menggunakan uang.

2) Uang Sebagai Alat Penimbun Kekayaan

Uang juga berfungsi sebagai alat penimbun kekayaan, selain dapat ditimbun dalam bentuk benda, kekayaan juga dapat disimpan dalam bentuk uang. Dalam keadaan ekonomi yang stabil kekayaan dalam bentuk uang lebih praktis karena dapat segera digunakan.

3) Sebagai Alat Pemindah Kekayaan

Uang dapat mempermudah dalam pemindahan kekayaan. Jika seseorang ingin pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia tidak perlu memindahkan kekayaan yang berupa tanah atau bangunan.

2.1.4.3 Jenis-Jenis Uang

Uang dapat dikelompokkan dalam berbagai jenis, yaitu:

1. Berdasarkan Bahan Baku

a. Uang Logam

Uang jenis ini terbuat dari logam (emas dan perak), kedua jenis logam tersebut memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu:

1. Nilainya yang cenderung lebih tinggi dan stabil.
2. Bentuknya mudah dikenali.
3. Sifatnya yang tidak mudah hancur.
4. Tahan lama.
5. Dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai.

Uang logam memiliki 3 nilai, yaitu:

1) Nilai Intrinsic

Yaitu nilai atau harga bahan baku (input) yang digunakan untuk membuat atau mencetak mata uang, misalnya nilai atau harga emas dan perak yang digunakan bahan baku untuk mencetak uang.

2) Nilai Nominal

Nilai yang terdapa pada mata uang atau nilai yang tertulis pada mata uang.

3) Nilai Tukar/Kurs Mata Uang

Adalah daya beli uang atau kemampuan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan mata uang negara lain.

b. Uang Kertas

Uang kertas merupakan uang yang terbuat dari kertas dimana di dalamnya tertera gambar dan cap khusus, dapat dugunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

2. Berdasarkan Nilai

a. *Full Bodied Money* (bernilai penuh)

Bernilai penuh adalah uang yang tertera diatas uang tersebut sama nilainya dengan nilai atau harga bahan yang digunakan atau uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal yang terkandung dalam uang tersebut.

b. *Representative Full Bodied Money* (Tidak Bernilai Penuh)

Merupakan nilai intrinsik lebih kecil daripada nilai nominal. Biasanya terdapat pada jenis uang kertas.

3. Berdasarkan Lembaga Penerbitan

a. Uang Kartal

Uang yang diterbitkan oleh Bank Sentral yaitu Bank Indonesia. Uang jenis ini merupakan alat pembayaran yang sah dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk uang kertas dan logam.

b. Uang Giral

Uang giral merupakan uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan (deposito) yang dapat diambil sesuai kebutuhan menggunakan cek, atau uang yang diterbitkan oleh Bank Umum (Bank Komersil) dalam bentuk cek atau bilyet giro.

c. Uang Internasional

Merupakan uang yang berlaku antara negara atau berlaku diseluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US Dollar.

2. Berdasarkan Kawasan

a. Uang Lokal

Uang lokal merupakan uang yang hanya berlaku disuatu negara tertentu, misalnya rupiah hanya dapat digunakan di Indonesia dan Filipina.

b. Uang Regional

Uang Regional adalah uang yang berlaku di suatu kawasan yang lebih luas daripada uang lokal, misalnya mata uang euro dapat digunakan untuk beberapa negara yang ada di Benua Eropa seperti Jerman, Spanyol, Australia dll.

c. Uang Internasional

Merupakan uang yang berlaku antar negara atau berlaku diseluruh dunia sebagai standar pembayaran, contohnya US Dollar.

2.1.4.4 Pengendalian Jumlah Uang Beredar

Pengendalian terhadap jumlah uang beredar merupakan kebijakan yang sangat esensial berkaitan dengan perekonomian suatu negara. Pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan merupakan aktor utama yang bertanggung jawab terhadap jumlah uang beredar di Indonesia. Namun demikian, kebijakan pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar ini tidak terlepas dari pelaku-pelaku lain dalam proses penciptaan uang beredar, yaitu (Boediono, 1993:85):

- a) Bank-bank umum (sektor perbankan) dan
- b) Masyarakat umum

Jumlah uang beredar, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jumlah uang beredar bisa membesar (ekspansif) atau mengecil (kontraktif), hal ini tergantung dari kebutuhan perekonomian. Tujuan pengendalian uang beredar ini tidak lain adalah untuk tercapainya pertumbuhan ekonomi nasional yang sifatnya stabil serta tidak terlampau tinggi.

Jumlah Uang Beredar yang terlalu besar, seperti pernah terjadi pada tahun 80-an, yaitu ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan deregulasi perbankan 1983 dan ditambah dengan kebijakan derelegasi 1988 (Pakto 1988), dampaknya juga tidak baik terhadap perekonomian jangka panjang. Kebijakan uang longgar (*easy money*) ketika itu, telah mengakibatkan aktivitas ekonomi yang terlampau tinggi (*overheated*), yang cenderung mendorong laju inflasi.

Untuk mengurangi Jumlah Uang Beredar ketika itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dikenal dengan “gebrakan Sumarlin”. Dalam rangka absorpsi rupiah tersebut oleh Bank Indonesia, pemerintah menaikkan tingkat suku bunga deposito sampai 24% per tahun. Dan hal ini memang terbukti ampuh dalam mengurangi Jumlah Uang Beredar.

2.1.5 Utang Luar Negeri

2.1.5.1 Pengertian Utang Luar Negeri

Utang luar negeri (Basri, 2000:127) adalah sebagai bantuan berupa program dan bantuan proyek yang diperoleh dari negara lain. Pinjaman luar negeri atau utang luar negeri merupakan salah satu alternatif pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan dan dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi.

Utang luar negeri dapat diartikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan aspek materiil, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi. Sedangkan berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan (Tribroto dalam Muhammad Iqbal, 2001).

2.1.5.2 Konsep Utang Luar Negeri (*Foreign Debt*)

Utang luar negeri diartikan berdasarkan berbagai aspek. Berdasarkan aspek materiil, pinjaman luar negeri merupakan arus modal masuk dari luar negeri ke dalam negeri yang dapat digunakan sebagai penambahan modal didalam negeri. Berdasarkan aspek formal, pinjaman luar negeri merupakan penerimaan atau

pemberian yang dapat digunakan untuk meningkatkan investasi guna menunjang pertumbuhan ekonomi, sedangkan berdasarkan aspek fungsinya, pinjaman luar negeri merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan yang diperlukan dalam pembangunan (Tribroto dalam Muhammad Iqbal,2001).

Laffer Curve Theory ini menggambarkan efek akumulasi utang terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut teori ini, pada dasarnya utang diperlukan pada tingkat yang wajar. Penambahan utang luar negeri mulai membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi sampai pada titik batas tertentu. Pada kondisi tersebut utang luar negeri merupakan kebutuhan normal setiap negara. Namun, pada saat stock utang telah melebihi batas tersebut maka penambahan utang luar negeri mulai membawa dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pinjaman atau bantuan luar negeri dapat berupa pinjaman pemerintah resmi seperti *official development assistance* (ODA), yakni pinjaman yang diberikan oleh pemerintah penerima bantuan yang dapat bersyarat lunak maupun kurang lunak. selain itu dapat berupa *non official development assistance* (non-ODA), yakni pinjaman yang diterima secara bilateral dari bank atau kreditor luar negeri dengan syarat-syarat berat, termasuk kreditor luar negeri dengan syarat-syarat menurut pinjaman komersial atau syarat-syarat berat, termasuk kredit ekspor dari luar negeri. Pinjaman luar negeri ini tergantung pada syarat-syarat pinjaman dari bantuan yang bersangkutan, yakni menyangkut tingkat suku bunga (*interest rate*), masa tenggang waktu (*grace period*)

sampai jangka waktu yang tidak perlu dilakukan pencicilan utang serta jangka waktu pelunasan utang (*amortization period*) sampai jangka waktu dimana pokok utang harus dibayar lunas kembali secara cicilan.

Untuk menentukan dan mengatur terlaksananya pengelolaan pinjaman utang luar negeri baik dan efektif perlu dilakukan berbagai hal, antara lain yaitu:

1. Memproyeksikan secara teliti profil waktu dari kewajiban-kewajiban pembayaran utangnya.
2. Memperkirakan penerimaan hasil ekspor, penerimaan dalam negeri dan akses dimana mendatang dalam berbagai sumber pembiayaan.
3. Memonitor potensi-potensi untuk pembayaran kembali utang-utangnya.

Ketiga hal ini bertujuan untuk mengambil manfaat dari pinjaman baru dengan syarat-syarat yang lebih baik, menyesuaikan jangka waktu pelunasan utang terhadap penerimaan yang dihasilkan proyek-proyek yang dibiayai dengan pinjaman, serta menanggulangi kekurangan-kekurangan hasil ekspor dalam membiayai kekurangan impor.

2.1.5.3 Peran Utang Luar Negeri (*Foreign Debt*) dan Alasan Dilakukannya Utang Luar Negeri (*Foreign Debt*)

Dalam hubungannya dengan kebijakan pembangunan di negara-negara berkembang, bantuan luar negeri terutama dianalisa dan ditinjau dari sudut

manfaatnya membantu pertumbuhan ekonomi negara untuk mencapai tujuannya.

Terdapat dua peranan utama dari bantuan luar negeri, yaitu :

1. Mengatasi masalah kekurangan tabungan (*saving gap*), dan
2. Mengatasi masalah kekurangan mata uang asing (*foreign exchange gap*).

Yang mana kedua masalah yang diharapkan dapat diatasi dengan melakukan pengajuan utang luar negeri itu disebut dengan “*masalah jurang ganda*” (*The two gaps problem*). Kegiatan untuk memberikan bantuan luar negeri oleh negara-negara maju kepada negara-negara yang sedang berkembang dilakukan dengan berbagai alasan, antara lain yaitu :

1. Membantu negara-negara yang menerima bantuan untuk mempercepat pembangunan ekonominya.
2. Membantu mengeratkan hubungan ekonomi dan politik diantara negara yang menerima dan memberikan bantuan.
3. Menahan pengaruh ideologi yang bertentangan dengan yang dianut oleh negara pemberi bantuan.

Utang luar negeri bukan hanya dibutuhkan dalam proses perdagangan saja, tetapi juga dibutuhkan dalam perekonomian suatu negara untuk menunjang proses produksi dalam negeri. Artinya, utang luar negeri merupakan mata ranai yang

menghubungkan kegiatan internal dan eksternal perekonomian suatu negara. Dalam pemahaman ini sulit sekali menyatakan bahwa suatu negara bisa saja tidak berutang sama sekali. Tetapi jelas sekali bahwa jumlah dan pemanfaatan utang tersebut harus dikendalikan dan dikelola secara benar sehingga justru tidak menjadi beban yang berkepanjangan.

2.1.5.4 Sumber-sumber Pinjaman Luar Negeri yang diterima oleh Pemerintah

Indonesia

Sumber-sumber pinjaman luar negeri yang diterima pemerintah Indonesia dalam setiap tahun anggaran yang berupa pinjaman bersumber dari:

1) Pinjaman Multilateral

Pinjaman multilateral sebagian besar diberikan dalam satu paket pinjaman yang telah ditentukan, artinya satu naskah perjanjian luar negeri antara pemerintah dengan lembaga keuangan internasional untuk membina beberapa pembangunan proyek pinjaman multilateral ini kebanyakan diperoleh oleh Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia, Bank Pembangunan Islam dan beberapa lembaga keuangan regional dan internasional.

2) Pinjaman Bilateral

Pinjaman bilateral adalah pinjaman yang berasal dari pemerintah negaranegara yang tergabung dalam negara anggota *Consultative Group On Indonesia* (CGI)

sebagai lembaga yang menggantikan kedudukan IGGI. Pinjaman bilateral ini diberikan kepada pemerintah Indonesia yang bersumber dari :

- a) Pinjaman Lunak, yaitu suatu pinjaman yang diberikan berdasarkan hasil sidang CGI.
- b) Pinjaman dalam bentuk Kredit Ekspor, yaitu pinjaman yang diberikan oleh negara-negara pengekspor dengan jaminan tertentu dari pemerintah negara-negara tersebut untuk meningkatkan eksportnya.
- c) Pinjaman dalam bentuk Kredit Komersial, yaitu kredit yang diberikan oleh bank-bank luar negeri dengan persyaratan sesuai dengan perkembangan pasar internasional.
- d) Pinjaman dalam bentuk *Installment Sale Financing*, yaitu pinjaman yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan leasing suatu negara tertentu untuk membiayai kontrak-kontrak antara pemerintah dengan supplier luar negeri, karena kontrak-kontrak pembangunan tersebut tidak dapat dibiayai dari fasilitas kredit ekspor.
- e) Pinjaman Obligasi, yaitu pinjaman yang dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan surat tanda berhutang dari peminjam dengan tingkat bunga tetap, yang pembayaran bunganya dilaksanakan secara teratur dan

pengembalian pinjaman (hutang pokok) pada jangka waktu yang telah ditetapkan.

2.1.5.5 Latar Belakang Timbulnya Utang Luar Negeri

Dari perspektif negara donor setidaknya ada dua hal penting yang dianggap memotivasi dan melandasi bantuan luar negeri ke negara-negara debitor. Kedua hal tersebut adalah motivasi politik (*political motivation*) dan motivasi ekonomi (*economic motivation*), dimana keduanya mempunyai keterkaitan yang sangat erat yang satu dengan yang lainnya (Basri, 2003:101).

Motivasi pertama inilah yang kemudian menjadi acuan bagi AS untuk menghancurkan dana bantuan dalam merekonstruksi kembali perekonomian Eropa Barat setelah hancur saat PD II, dan program ini dikenal dengan nama Marshall Plan (Todaro, dalam Muhammad Iqbal 1985:89).

Kesimpulannya cukup sederhana, yaitu bahwa bantuan luar negeri pertamanya harus dilihat sebagai tangan panjang kepentingan negaranegara donor. Motivasinya condong berbeda tergantung situasi nasional, dan bukan semata-mata dikaitkan dengan kebutuhan negara penerima yang secara potensial berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya. Sedangkan motivasi ekonomi sebagai landasan kedua yang digunakan dalam memberikan bantuan, setidaknya tercermin dari 4 argumen penting :

1. Argumen pertama didasari oleh *two gap model* dimana negara-negara penerima bantuan khususnya negara-negara berkembang mengalami kekurangan dalam mengakumulasi tabungan domestik sehingga tabungantabungan yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan akan tingkat investasi yang dibutuhkan dalam proses memicu pertumbuhan ekonomi. Dan pada sisi lain kekurangan yang dialami oleh negaranegara yang bersangkutan adalah dalam memenuhi nilai tukar asing (*foreign exchange*) untuk membiayai kebutuhan impor. Dengan demikian untuk menutupi kedua kekurangan tersebut maka andalannya adalah bantuan luar negeri.
2. Memfasilitasi dan mempercepat proses pembangunan dengan cara meningkatkan penambahan tabungan domestik sebagai akibat dari pertumbuhan yang lebih tinggi (*growth and saving*). Karena tingginya pertumbuhan di negara-negara berkembang akan turut meningkatkan atau berkorelasi positif terhadap kenaikan keuntungan yang bisa dinikmati di negara-negara maju.
3. *Technical Assistance*, yaitu merupakan pendamping dari bantuan keuangan yang bentuknya adalah transfer sumber daya manusia tingkat tinggi kepada negara-negara penerima bantuan. Hal ini harus dilakukan untuk menjamin bahwa aliran dana yang masuk dapat digunakan dengan sangat efisien dalam proses memicu kenaikan pertumbuhan ekonomi.

4. *Absorptive Capacity*, yaitu dalam bentuk apa dana tersebut akan digunakan sebagai negara berkembang tetap konsisten dalam mempergunakan utang luar negeri dalam politik pembangunannya, Indonesia untuk masa mendatang masih tergantung pada komponen ini. Seberapa besar ketergantungannya tentu banyak faktor yang mempengaruhinya. Apapun agrumennya, untuk saat ini mengalirnya dana dari luar negeri merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi Indonesia untuk menginjeksi dana pembangunannya. Di era globalisasi dan dengan tingkat persaingan yang begitu besar, disamping pemerintah, pihak swasta juga memerlukan dana, akan mengakibatkan perburuan pinjaman yang bersyarat lunak akan meningkat dan tentunya akan semakin sulit diperoleh. Melihat kondisi ini, diperkirakan akan menjadi peningkatan dalam pinjaman resmi yang bersyarat lunak. Oleh karena itu, tidaklah heran untuk masa perspektif utang luar negeri Indonesia dicirikan pada meningkatnya pinjaman yang bersifat komersial.

Banyak pihak yang mengkhawatirkan kondisi pinjaman luar negeri pemerintah maupun pinjaman swasta cukup beralasan. Angka statistik pinjaman luar negeri Indonesia, baik pemerintah maupun swasta memang masih menunjukkan tingginya kewajiban Indonesia dalam membayar kembali pokok dan bunga pinjaman luar negeri. Beberapa indikator dalam mengukur beban utang, seperti :

1. *Debt Service Ratio* (DSR), merupakan perbandingan antara kewajiban membayar utang dan cicilan utang luar negeri dengan devisa hasil ekspor.

Ambang batas aman angka DSR lazimnya menurut para ahli ekonomi adalah 20%. Lebih dari itu, utang sudah dianggap mengundang cukup banyak kerawanan.

2. *Debt to Ekspor Ratio*, merupakan rasio utang terhadap ekspor. Bank dunia menetapkan bahwa suatu negara dikategorikan sebagai negara pengutang bera, jika negara yang bersangkutan memiliki *Debt to Ekspor Ratio* yang lebih besar dari 220%.
3. *Debt to GDP Ratio*, merupakan rasio utang terhadap PDB. Rasio utang terhadap PDB dapat dilihat sebagai kriteria mengecek kesehatan keuangan suatu negara, dimana rasio di atas 50% menunjukkan bahwa pinjaman luar negeri Indonesia membenahi lebih dari 50% pendapatan nasional (Basri, 2003:201).

Pinjaman luar negeri tersebut tidak semua diberikan dalam bentuk rupiah atau tepatnya mata uang asing tertentu tetapi dalam bentuk bantuan proyek dan bantuan program. Bantuan proyek diberikan dalam bentuk pinjaman berupa peralatan-peralatan, barang-barang ataupun jasa (konsultan asing), sedangkan bantuan program diberikan dalam bentuk bantuan tunai.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan ataupun kajian terhadap penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penelitian-penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Matriks Referensi Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Metode	Kesimpulan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Satria Lesmana Achmad Husaini (2019)	Analisis Pengaruh Utang Luar Negeri, Penanaman Modal dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Periode 2010-2018)	-Utang Luar Negeri -Penanaman Modal Asing -Penanaman Modal Dalam Negeri -Inflasi	OLS	Secara simultan Utang Luar Negeri, PMA, PMDN dan Inflasi berpengaruh terhadap PDB. -Secara Parsial Utang Luar Negeri dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap PDB sedangkan secara parsial PMA dan PMDN berpengaruh signifikan terhadap PDB.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Ahmad Ridhotul Ikhsan Sukardi	Pengaruh Neraca Perdagangan, Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	-Neraca perdagangan -Inflasi -Jumlah Uang Beredar	OLS	Secara parsial variabel Neraca Perdagangan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, variabel Inflasi berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan
					Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Dwi Kristianingsih (2019)	Analisis pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi, Investasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2000-2017	-Jumlah Uang Beredar -Inflasi -Investasi -Nilai Tukar Rupiah	OLS	Berdasarkan pengelolaan data, diperoleh bahwa Jumlah Uang Beredar dan Investasi memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Septiana Sari (2020)	Pengaruh Utang Luar Negeri, Sukuk, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2014-2019	-Utang Luar Negeri -Sukuk -Inflasi -Tingkat Suku Bunga	OLS	Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel dependen Utang Luar Negeri berpengaruh secara positif dan signifikan. -Sukuk, Inflasi dan Tingkat Suku Bunga berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan melalui PDB.
5.	Abdul Malik, Denny Kurnia (2017)	Pengaruh Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	-Utang Luar Negeri -Penanaman Modal Asing	OLS	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ternyata Utang Luar Negeri dan Penanaman Modal Asing berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
6.	Susanto	Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	-Inflasi -Tingkat Suku Bunga -Nilai Tukar	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial maupun secara simultan variabel Inflasi, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7.	Frisyelia Renshy Tiwa, Vekie Rimate, Avriano Tenda (2016)	Pengaruh Investasi, Suku Bunga, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2005-2014	-Investasi -Suku Bunga -Sertifikat Bank Indonesia (SBI) -Jumlah Uang Beredar	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Investasi, Suku Bunga SBI dan Jumlah Uang Beredar secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
8.	Aswani, Hafizatul Fitria (2018)	Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Inflasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	-Jumlah Uang Beredar -Tingkat Suku Bunga -Inflasi	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Investasi, Suku Bunga SBI dan Jumlah Uang Beredar secara parsial berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.
9.	M. Yazid AR	Pengaruh Inflasi, Kurs dan Suku Bunga Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	-Inflasi -Kurs -Suku Bunga	OLS	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inflasi, Kurs dan Suku Bunga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

10.	Wiwiet Aji Prihatin, Aritoko, Suharno (2019)	Pengaruh Variabel-variabel Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia	-Suku Bunga SBI -Investasi -Inflasi -Kurs -Jumlah Uang Beredar		Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Suku Bunga SBI dan Jumlah Uang Beredar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. -Variabel Investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan Kurs dan Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
-----	--	---	--	--	--

2.2. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah konsep untuk mengungkapkan dan menentukan persepsi dan keterkaitan antara variabel yang akan diteliti dengan teori-teori yang telah dipaparkan dalam tinjauan pustaka. Mengacu pada teori yang ada, maka garis besar penelitian ini yaitu melihat hubungan antara pengaruh Inflasi, Investasi, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar Negeri terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia Tahun 2008-2020.

2.3.1 Hubungan Inflasi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik akan menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat dan menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan berkurang. Apabila keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan berkurang, maka pertumbuhan ekonomi akan semakin menurun. Hal ini disebabkan karena inflasi mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiwiet Aji Prihatin dan Aritoko Suharno (2019), hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel inflasi mempunyai hubungan yang negatif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.3.2 Hubungan Investasi dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Investasi merupakan pembentukan modal yang dapat meningkatkan perekonomian. Semakin tinggi nilai investasi yang dikelola maka kondisi perekonomian pun akan semakin meningkat. Hal ini terjadi karena investasi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian dari Dwi Kristianingsih (2019) yang mengatakan bahwa investasi mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.3.3 Hubungan Jumlah Uang Beredar dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Jumlah uang beredar memiliki hubungan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Semakin meningkat jumlah uang beredar, maka masyarakat akan mengeluarkan sebagian dananya untuk memproduksi barang lebih banyak yang kemudian permintaan akan produksi meningkat. Hal ini berpengaruh pada pendapatan perkapita yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

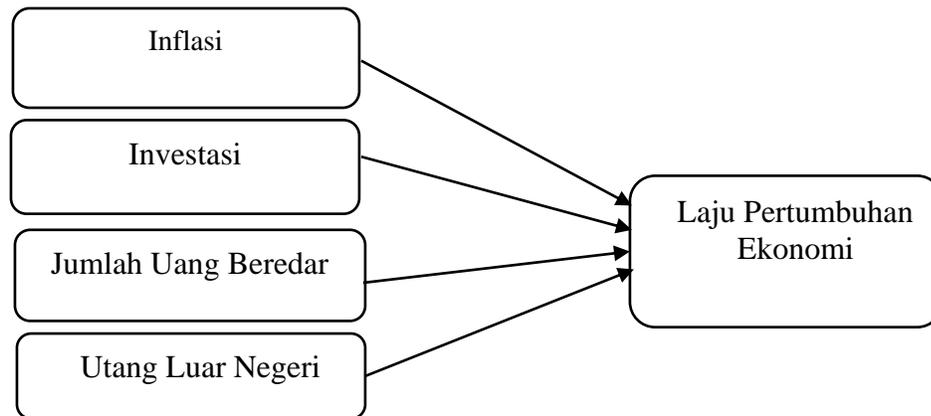
Hasil penelitian yang sama terjadi pada penelitian Aswani dan Hafizatul Fitria (2018), dimana jumlah uang beredar mempunyai hubungan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini diperkuat oleh Ahmad Ridhotul dan Ikhsan Sukardi dalam penelitiannya dimana jumlah uang beredar mempunyai hubungan positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

2.3.4 Hubungan Utang Luar Negeri dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang giat-giatnya untuk melakukan pembangunan disegala sektor. Namun kenyataannya Indonesia tidak mampu untuk membiayai semua sektor pembangunan nasional. Maka dilakukanlah utang luar negeri. Utang pemerintah terhadap luar negeri dapat mendorong perekonomian dalam negeri sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.

Menurut Sadono Sukirno (1985: 37) menyatakan bahwa pinjaman luar negeri merupakan suatu pinjaman yang diberikan suatu negara ke negara lain yang berkewajiban untuk membayar kembali dan membayar bunga atas pinjaman tersebut sebagai balas jasa dari pemilik modal yang bersangkutan. Berdasarkan penelitian bahwa utang luar negeri mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Penelitian ini diperkuat dengan penelitian Satria Lesmana dan Achmad Husaini (2019), peneliti menyimpulkan bahwa secara simultan utang luar negeri Indonesia mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sektor-sektor ekonomi yang menyerap utang luar negeri cukup tinggi, terbukti menunjukkan pertumbuhan PDB yang terus meningkat.



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka pemikiran yang telah dibahas sebelumnya, maka hipotesis dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Diduga secara parsial Inflasi mempunyai pengaruh negatif sedangkan Investasi, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar Negeri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
2. Diduga secara bersama-sama Inflasi, Investasi, Jumlah Uang Beredar dan Utang Luar Negeri mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia.